

Bertemu Prabowo, Sandiaga Uno Berikan Buku Perjalanan Pilpres 2019

JAKARTA (IM) - Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Sandiaga Uno, bertemu Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto. Informasi soal pertemuan itu dibagikan Sandiaga dalam sebuah posting-an foto di akun Instagram miliknya, @sandiuno, Rabu (11/1).

Pertemuan ini terjadi di tengah-tengah isu Sandiaga meninggalkan Gerindra untuk merapat ke Partai Persatuan Pembangunan (PPP) berkaitan dengan Pilpres 2024.

"Terima kasih Pak @prabowo telah berkenan menerima buku 1500 Inspirasi: Jelajah Perjalanan Sandiaga Uno. Buku ini adalah catatan perjalanan semasa kampanye pilpres tahun 2019," tulis Sandiaga dalam akun Instagramnya yang dikutip, Kamis (12/1).

Dalam posting-an foto itu, tampak Sandiaga berabaju batik biru dan Prabowo berabaju safari warna krem. Keduanya tampak memegang sebuah buku berjudul "1.500 Inspirasi: Jelajah Perjalanan Sandiaga Uno". Buku itu ditulis oleh Yuga

Aden. Sandiaga dalam akun Instagram itu juga menyampaikan bahwa buku tersebut memberikan semangat dalam kontribusi terbaik bagi negeri.

"Menjadi pegangan kami untuk fokus pada tujuan kami menciptakan lapangan kerja seluas-luasnya, mempercepat pemulihan ekonomi, dan mewujudkan Indonesia yang *baldataun thoyyibatun wa robbun ghofur*," kata Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif itu.

Sandiaga Uno dikabarkan selangkah lagi bergabung dengan PPP. Sandiaga beberapa bulan terakhir kerap melontarkan pernyataan bahwa dia siap maju untuk Pilpres 2024. Sementara Partai Gerindra pada Agustus 2022 lalu telah mendeklarasikan bahwa Prabowo Subianto sebagai capres 2024.

Di tengah isu tersebut, Prabowo menyindir kader Gerindra yang hendak keluar dari partai. Ia mempersilakan kader yang merasa tak cocok dengan dirinya untuk menghang dari Gerindra. ● **mei**

KSAL Berencana Menambah Pangkalan AL dan Personel di Papua

JAKARTA (IM) - Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana Muhammad Ali mengungkapkan ada rencana menambah pangkalan AL (Lanal) atau personel di Papua.

Seperti diketahui, Ali bersama Panglima TNI Laksamana Yudo Margono, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) Marsekal Fajar Prasetyo, dan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Dudung Abdurachman, baru saja mengunjungi Bumi Cenderawasih.

"Nah ini kan ada pengembangan provinsi di sana, itu tentunya pasti ada yang berkembang juga dari TNI. Ada penambahan jumlah (personel)," kata Ali di Sekolah Staf dan Komando AL (Seskoal), Jakarta Selatan, Kamis (12/1).

Ali mengatakan, Lanal baru akan dibangun di provinsi baru di Papua dengan penambahan personel. "Mungkin ada Lanal baru, nanti ada beberapa personel yang ditambah di sana, di beberapa provinsi yang baru," ujar Ali.

Adapun Laksamana Yudo Margono bersama Listyo Sigit dan kepala staf tiga matra mengunjungi Papua pada Minggu (8/1) hingga Rabu (11/1).

Agenda pertama, mereka meresmikan Markas Kepolisian Daerah (Mapolda) Papua yang baru di Koya Tengah, Jayapura, Papua, Minggu (8/1). Kemudian agenda ditutup dengan kunjungan kerja di Sorong, Rabu (11/1).

Yudo Margono menyampaikan bahwa pembangunan infrastruktur di Papua merupakan sebuah tantangan sekaligus peluang yang harus terus didorong bersama.

"Menjadi tantangan karena kondisi geografis dan konektivitas di beberapa wilayah di Papua masih cukup menyulitkan. Akan tetapi, tidak boleh menyerah karena pembangunan juga merupakan peluang untuk mengejar ketertinggalan dan meningkatkan taraf hidup dan perekonomian di Papua," kata Yudo Margono.

"Menjadi tantangan karena kondisi geografis dan konektivitas di beberapa wilayah di Papua masih cukup menyulitkan. Akan tetapi, tidak boleh menyerah karena pembangunan juga merupakan peluang untuk mengejar ketertinggalan dan meningkatkan taraf hidup dan perekonomian di Papua," kata Yudo Margono, dikutip dari siaran pers Pusat Penerangan TNI, Senin (9/1) lalu. ● **han**

Satgas Covid-19 Tetap Bertugas meski PPKM telah Dicabut

JAKARTA (IM) - Tugas Satgas Penanganan Covid-19 ternyata belum berakhir meski pemerintah telah mencabut Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).

Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito mengatakan, hingga kini Satgas masih menjalankan tugasnya sesuai aturan. Tugas penanganan Covid-19 dijalankan hingga kondisi pandemi membaik dan masyarakat lebih tahan (resilien) terhadap virus tersebut.

"Sampai saat ini Satgas Covid-19 masih menjalankan tugasnya dalam kondisi transisi menuju endemi sampai dengan masyarakat benar-benar resilien dari Covid-19 serta WHO mencabut status pandemi di dunia," ucap Wiku saat dihubungi wan, Kamis (12/1).

Kendati begitu, Wiku mengatakan, tugasnya sedikit berbeda dibanding masa pandemi. Saat ini, tugas yang dilakukan Satgas berada di lingkup mengatur Rumah Sakit (RS) Darurat Covid-19. Salah satu Rumah Sakit Darurat Covid-19, yakni RSDC Wisma Atlet masih beroperasi hingga 31 Maret 2023.

Selama tiga bulan ke depan, hanya satu tower

di RSDC Wisma Atlet yang dioperasikan seiring landainya kasus Covid-19 di Tanah Air.

"Satgas Covid-19 saat ini berfokus dalam menjaga keselamatan masyarakat melalui kebijakan publik dan RS Darurat Covid-19," kata Wiku.

Tugas Satgas juga melakukan edukasi kepada masyarakat untuk menjalani perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS), khususnya memakai masker. Apalagi, jika masyarakat dalam kondisi sakit. Selain menjaga diri agar tidak terkena virus dari luar, memakai masker juga bertujuan tidak menularkan virus kepada orang lain.

"(Melakukan) promosi kesehatan khususnya memakai masker dan PHBS perilaku hidup bersih dan sehat, seperti istirahat cukup, aktif berolahraga, makan-makanan sehat, dan lain-lain. Demi menjaga imunitas masyarakat tetap tinggi dan masyarakat terlindungi dari Covid-19," ujar Wiku.

Sebelumnya Wiku juga menyatakan, penanganan pasien Covid-19 akan tetap jalan terus meski PPKM dicabut. Presiden Joko Widodo memutuskan menghentikan PPKM pada Jumat 30 Desember 2022. ● **mei**

2 Polhukam

FOTO: ANTARA



PAPARAN AWAL TAHUN PARTAI DEMOKRAT

Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) memberikan keterangan pers awal tahun 2023 terkait isu terkini dan sikap Partai Demokrat jelang Pemilu 2024 di Kantor DPP Partai Demokrat, Jakarta, Kamis (12/1). Dalam keterangannya AHY mengatakan Partai Demokrat menolak UU Cipta Kerja serta sistem proporsional tertutup pada Pemilu 2024.

Penyelesaian Kasus HAM Berat Masa Lalu Harus Dibarengi Pemberian Hak-hak Korban

Pemerintah tidak cukup hanya mengakui dan minta maaf kepada korban pelanggaran HAM berat masa lalu, tapi harus ditindaklanjuti dengan memberikan hak-hak korban.

JAKARTA (IM) - Koordinator Komisi Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) Fatia Maulidiyati mengatakan, pengakuan dan penyesalan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat tidak ada artinya jika tak disertai langkah konkret.

Langkah konkret yang dimaksudnya berupa pertanggungjawaban hukum dalam penyelesaian pelanggaran HAM berat sangat diperlukan. "Kami memandang bahwa pengakuan dan penyesalan yang disampaikan Presiden Jokowi tentu tidak ada artinya jika tidak diikuti dengan langkah konkret pertanggungjawaban hukum dan akuntabilitas negara dalam menyelesaikan kasus pelanggaran HAM berat masa lalu," ujar Fatia dilansir dari siaran pers di laman resmi KontraS, Kamis (12/1).

Pada dasarnya, rekomendasi perihal pengakuan atas adanya kejahatan kemanusiaan bukanlah hal baru. Sebab sejak 1999, Komnas HAM sudah menyampaikan rekomendasi demikian kepada presiden saat itu.

"Bahkan, tidak hanya sekedar pengakuan melainkan permintaan maaf, mengingat pelanggaran HAM berat adalah akibat penyalahgunaan kekuasaan badan/pejabat pemerintahan," tutur Fatia. Dia menekankan, pengakuan dan permintaan maaf kepada korban pelanggaran

HAM berat masa lalu tidak dapat berdiri sendiri. Pengakuan dan permintaan maaf tersebut harus ditindaklanjuti dengan rangkaian tindakan untuk memberikan hak-hak korban secara keseluruhan.

Namunsejauh catatan dan pemantauan KontraS selama ini, model pemulihan yang terjadi terdapat indikasi bahwa muatannya menyalahi prinsip keadilan, misal dengan tidak berpihak kepada korban sebagai pemangku utama kepentingan.

"Pemerintah di sejumlah kesempatan tertangkap tangan membuat peraturan dan kegiatan yang seolah ingin pelanggaran HAM berat selesai, namun tidak sesuai dengan standar penegakan HAM yang berlaku secara universal," ucapnya.

Shingga, KontraS khawatir pernyataan Presiden Jokowi yang berangkat dari rekomendasi Tim Penyelesaian Non Yudisial Pelanggaran Hak Asasi Manusia (PPHAM) dikhawatirkan hanya pemanis yang menempatkan penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat hanya mendorong pada mekanisme non-yudisial.

"Sekaligus mewajarkan praktik pengabaian terhadap pengadilan HAM yang buruk terjadi selama ini. Ditambah pembiaran terhadap tidak dilakukannya reformasi kelembagaan yang selama ini menjadi aktor pelanggaran HAM berat," kata Fatia.

"Dengan kata lain, pengakuan, penyesalan, serta pernyataan Presiden Jokowi lainnya atas rekomendasi hasil Tim PPHAM tidak lebih dari pembaruan terhadap janji lama," katanya menam-

kan. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menerima laporan dari Tim PPHAM di Istana Negara pada Rabu (11/1). Presiden mengatakan, dirinya sudah secara seksama membaca laporan tersebut. Dari laporan yang diberikan oleh PPHAM, Presiden mengakui bahwa pelanggaran HAM berat terjadi di Indonesia.

"Dengan pikiran yang jernih dan hati yang tulus, saya sebagai Kepala Negara Republik Indonesia mengakui bahwa pelanggaran HAM yang berat memang terjadi di berbagai peristiwa," ujar Jokowi dalam keterangannya usai menerima laporan.

"Dan saya sangat menyesalkan terjadinya peristiwa pelanggaran hak asasi manusia yang berat pada 12 peristiwa," katanya. Kepala Negara kemudian merinci 12 peristiwa pelanggaran HAM berat yang dimaksud. Keduabelas peristiwa terjadi dalam rentang waktu sejak 1965 hingga 2003.

Berikut 12 kasus pelanggaran HAM berat tersebut: Peristiwa 1965-1966, Peristiwa Penembakan Misterius (petrus) 1982-1985, Peristiwa Talangari, Lampung 1989, Peristiwa Rumoh Geudong dan Pos Sattis, Aceh 1989, Peristiwa penghilangan orang secara paksa 1997-1998, Peristiwa Kerusuhan Mei 1998 peristiwa Trisakti dan Semanggi I - II 1998-1999.

Kemudian peristiwa pembunuhan dukun santet 1998-1999 peristiwa Simpang KKA, Aceh 1999, Peristiwa Wasior, Papua 2001-2002, Peristiwa Wamena, Papua 2003, dan Peristiwa Jambo Keupok, Aceh 2003. ● **han**

KASUS PEMALSU SURAT P.T. TGM MA Tetap Hukum Wang Xiu Juan dan Mahyudin 3 Tahun Penjara

JAKARTA (IM) - Permohonan kasasi yang diajukan Wang Xiu Juan alias Susi dan Ir. Mahyudin, terkait tindak pidana pemalsuan surat PT Tuah Globe Mining (TGM) ditolak.

Putusan majelis hakim Mahkamah Agung (MA) justru menguatkan putusan pengadilan di bawahnya, yakni Pengadilan Negeri (PN) Palangka Raya dan Pengadilan Tinggi Palangka Raya, yang sebelumnya memvonis keduanya masing-masing 3 tahun penjara.

Dalam amar putusan kasasi majelis hakim MA yang diketuai oleh Desnawati mengatakan, Wang Xiu Juan alias Susi dan Ir. Mahyudi terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pemalsuan surat PT TGM.

"Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Terdakwa Wang Xiu Juan

Alias Susi," demikian bunyi amar putusan kasasi sebagaimana dikutip dalam SIPP Pengadilan Negeri Palangka Raya, Rabu (11/1).

Majelis hakim MA juga menolak permohonan kasasi yang diajukan Ir H.M. Mahyudin.

Pengadilan tingkat pertama sebelumnya menghukum Ir Mahyudin dan Wang Xiu Juan alias Susi, masing-masing 3 tahun penjara. Lalu keduanya melakukan upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi Palangka Raya.

Namun, putusan majelis hakim Pengadilan Tinggi Pelangka Raya pada 1 Agustus 2022 lalu, tetap menghukum keduanya masing-masing 3 tahun penjara.

Mahyudin dan Wang Xiu Juan alias Susi yang perkaranya di split, kemudian mengajukan kasasi. Tapi lagi-lagi permohonan kasasi mereka kandas. Majelis ha-

kim MA tetap menghukum keduanya masing-masing 3 tahun penjara.

Tindakan pemalsuan surat palsu yang dilakukan Mahyudin pada Juni 2019, setelah tidak lagi menjabat sebagai Direktur PT TGM. Tindakan pemalsuan tersebut kemudian dilaporkan manajemen PT TGM ke kepolisian.

Onggo, kuasa hukum PT TGM menilai putusan kasasi MA terhadap Mahyudin Cs sudah tepat. Sebab itu, ia meminta agar semua pihak harus tunduk atas putusan MA tersebut.

"Kami mengapresiasi aparat penegak hukum yang telah memproses perkara ini hingga adanya putusan Mahkamah Agung yang menolak kasasi para terdakwa. Pemalsuan surat PT TGM yang dilakukan Mahyudin dan Wang Xiu Juan alias Susi, tidak terbantahkan lagi," katanya. ● **lus**



SIDANG LANJUTAN PERINTANGAN PENYIDIKAN

Terdakwa kasus dugaan perintangan penyidikan pembunuhan Brigadir Yosua, dari kiri, Chuck Putranto, Baiquni Wibowo, Arif Rachman Arifin dan Irfan Widyanto tiba untuk menjalani sidang lanjutan di PN Jakarta Selatan, Jakarta, Kamis (12/1).

PENGUMUMAN

Untuk memenuhi ketentuan undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dengan ini Direksi PT. Marutek Jaya Nusantara, berkedudukan di Cibubur Villa II, Blok F65, Cimanggis Kota Depok ("Perseroan"), dengan ini Mengumumkan bahwa pemegang saham berencana untuk mengalihkan seluruh saham-sahamnya kepada pihak lain ("Akuisisi Saham") yang akan mengakibatkan perubahan pengendalian terhadap perseroan.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka setiap pihak yang keberatan atas rencana pengalihan saham dapat mengajukan keberatannya kepada Perseroan ke alamat sebagaimana tersebut diatas, disertai dengan bukti yang sah paling lambat 14 hari kalender terhitung sejak pengumuman ini.

Depok, 08 Januari 2023
Direksi PT. MARUTEK JAYA NUSANTARA
Para Pemegang Saham PT. MARUTEK JAYA NUSANTARA

mandiri

PENAWARAN PENGALIHAN PIUTANG (CESSIE)

Bahwa dalam rangka penyelesaian kredit bermasalah, PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk akan melakukan penjualan atau pengalihan piutang (Cessie) terhadap list debitur sebagai berikut:

No.	Nama	Alamat	Jumlah Kewajiban Per Tgl 12/01/2023	Agunan Kredit
1.	Denmal Utama	Jl. Teh No. 19 A Pinangsiya Jakarta	Rp 380.390.088.00	1.) Lokasi di: Kampung Bangka, Kel. Bangka Kec. Mampang Prapatan, Kota Jakarta Selatan, Prov. DKI 2.) Lokasi di: Desa Pondok Cabe Lulik, Kec. Pamulang Kab. Tangerang, Prov. Jawa Barat
2.	PT. Lobroz Protama I	Jl. Zamrud II B-4 Cilandak Permai Jakarta Selatan	Rp 664.106.165.47	Lokasi di: Jl. Golf LK.2 Citatah, Desa Ciriung Kec. Cibinong, Kab. Bogor, Prov. Jawa Barat.
3.	Halim Putra Mahardika	Jl. Ir. H. Juanda III/23, Jakarta	Rp 480.756.251.00	Lokasi di: Blok Lingsi Desa Sridjaja Kec. Tambun, Kab. Bekasi Prov. Jawa Barat.
4.	Putra Utama	Jl. Jambangan Raya No. 25 B Duri Selatan, Jakarta Barat	Rp 104.999.999.01	Lokasi di: Kel. Makasar Kec. Kramat Jati, Kota Jakarta Timur Prov. DKI Jakarta.

Apabila ada yang berminat dalam pengalihan kredit debitur di atas dapat menyampaikan penawaran secara tertulis ke alamat dibawah ini paling lambat tanggal 16 Januari 2023, jam 12.00 WIB.

PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk.
Retail Collection & Recovery Group
Regional Retail Collection & Recovery Region V
Wisma Mandiri II L17
Jl. Kebon Sirih No.83, Jakarta 10340
Telp. 30023002 Ext. 7224393.

Demikian untuk di ketahui semua pihak.
Jakarta, 13 Januari 2023
PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk.
Regional Retail Collection & Recovery Region V / Jakarta 3